

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Penentuan Sekolah dalam daftar *regrouping*
2. penolakan program *regrouping*
3. Faktor penentu keberhasilan program Regrouping
4. sosialisasi kebijakan *regrouping*
5. Perencanaan Peserta Didik
6. Perencanaan Sarana Prasarana
7. Perencanaan Sekolah Induk
8. Perencanaan Komite Sekolah



## TRANSKRIP WAWANCARA

### 1. Penentuan Sekolah Sasaran

“... jadi datanya dari lapor bulan kemudian dilaporkan ke kabupaten, terus dari kabupaten, pemetaannya itu satu kabupaten bukan hanya kecamatan, sekian ratus, misalnya untuk kota ...” (Kepala SDN 1 Karanglo Lor, 28, Juni 2022).

“Jadi kepala UPT megkader, yang tahap pertama dari Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan tentang batas minimal siswa disuatu sekolah binaan, yang menjadi acuannya, diantaranya bahwa rasio antara guru dengan siswa itu satu guru 20 siswa” (Kepala SDN 1 Karanglo Lor, 28, Juni 2022).

“... jadi datanya dari lapor bulan kemudian dilaporkan ke kabupaten...” (Kepala SDN 1 Karanglo Lor, 28, Juni 2022). Dari data tersebut dapat diketahui sekolah mana yang kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk berdiri sendiri ataupun melakukan pembelajaran secara mandiri.

“Kita ambil skala prioritas. Jadi tidak harus siswanya yang kurang dari 100 diregroup, tetep kita ambil skala prioritas ...” (Sumani, M.Pd. Kepala SDN 1 Karang Lo Lor, 6 Juni 2022). Selanjutnya salah seorang tim *regrouping* di waktu yang sama lebih lanjut menjelaskan,

“Kami, kebijakan kami di sini. Jadi skala prioritas adalah kebijakan kami di sini dengan berbagi pertimbangan, sebelum kami mengeluarkan kebijakan. Kami sebetulnya sudah turun ke lapangan, ya ke sekolah, ke lingkungannya, ke masyarakatnya kita ajak gendu-gendu rasa yang secara tidak langsung. Sebelumnya mereka kita pancing persepsinya gimana bila ada seperti ini, mereka tidak sadar” (Sumani, M.Pd. Kepala SDN 1 Karang Lo Lor, 6 Juni 2022).

“... tapi dari keputusan kantor, bila mana SD itu muridnya kurang dari 100, itu mendapat undangan supaya hadir di kumpulan di kecamatan” (Tmr, 20/0612-22). Diharapkan dari sosialisasi awal ini, pihak sekolah dapat menyampaikan kepada warga sekolah yang lain tentang rencana *regrouping* sekolah yang akan dilaksanakan.

“Sosialisasi kita memang agak kesulitan untuk menyadarkan masyarakat karena polemik masyarakat taunya ya kalau di desa itu masih ada SD-nya itu menjadi suatu kebanggaan. Begitu pula aspirasi itu biasanya dituangkan oleh kades. kades karena ada kepentingan tertentu, politik, biar dia dipilih sehingga sangat-sangat mempertahankan walaupun sebetulnya keadaan SD tersebut menurut aturan sudah harus diregroup” (Tsb, 28, Juni 2022).

## 2. Penolakan Program *Regrouping*

“Gejolaknya gini, ada yang menganggap sekolah itu sebagai wajah desa, desa dianggap terbelakang kalau tidak punya sekolah. Ada lagi sekolah itu punya nilai historis. Jaman dulu misalnya mendirikan pakai apa istilahnya bergotong royong, terus apa, pakai warga desa itu istilahnya ya gotong royong itu, saling urunan, ada yang urunan usuk, ada yang urun bata, dan sebagainya. Ada nilai historisnya, biasanya seperti itu. Ada nilai historisnya sehingga orang-orang yang tua itu tidak memikirkan. Kadangkadang tidak berfikir jauh ke depan demi kemajuan anak, tapi masih nilai historisnya dinilai terlalu tinggilah. Dikatakan cagar budaya padahal sebetulnya bukan cagar budaya, yang dinamakan cagar budaya kan ada sendiri bangunan cagar budaya. Ada yang seperti itu” (Sst, 30/06 2022).

“Regroupnya jadi melalui sosialisasi yang tidak pernah henti baik dari panitia yang ada di sekolah maupun panitia yang ada di tingkat kecamatan. Biasanya tingkat kabupaten itu hanya menerima hasilnya, tapi ujung tombaknya justru kami yang ada di kecamatan. Jadi kalau kita pandai mensosialisasikan ya SD itu lalu menerima tidak bertele-tele. Tapi kalau petugas sosialisasinya mbingungke itu prosesnya pakai waktu” (10 Juni 2022).

“Pengambilan keputusan ya berdasarkan musyawarah warga setempat, jadi tidak memaksakan harus diregroup tidak. Kepala desa, tokoh masyarakat, komite, wali murid itu kesepakatannya bagaimana, ingin diregroup atau tetap sendiri. Kalau dari kesepakatan warga masyarakat itu diregroup, itu ya diregroup, kalau masih bertahan ya kita masih berikan toleransi. Kan tidak ada paksaan harus diregroup, itu tergantung masing-masing desa, kan ana sing desa ya saiki *regroup* wae dadi siji men kepenak, dengan kesadaran sendiri itu. Ada yang masyarakat bertahan untuk masalah jumlah murid nanti desa mau berusaha supaya muridnya bertambah, ada. Jadi berfariasi ini mba” (Kepala SDN 1 Karanglo Lor, 6 Juni 2022).

## 3. Perencanaan Peserta Didik

“Masalah siswa sepenuhnya kita kembalikan keorang tua siswa masingmasing. Jadi tidak ada kami memaksa harus ke SD induk tidak. Kita berikan kepada siswa dan orang tuanya untuk memilih sekolah. Masalah ke SD mana silahkan cari yang dekat, masyarakat biasanya memilih yang lebih dekat” (Sumani, M.Pd. Kepala SDN 1 Karang Lo Lor, 6 Juni 2022).

## 4. Perencanaan Tenaga Pendidik

“Tapi dalam mutasi ya perlu pertimbangan. Pertimbangan yang pertama jarak tempuhnya jauh atau tidak, pertimbangan yang kedua sesuai dengan kebutuhan, upamanya SD B ini yang mau ditambah gurunya kekurangan tenaga laki-laki, minta tenaga laki-laki, ya itu nanti dipindahkan yang lakilaki. SD B kekurangan tenaga perempuan, dikasih yang perempuan jaraknya jangan yang terlalu jauh, itu, jadi sesuai dengan kebutuhan SD sekitar” (Kepala SDN 1 Karanglo Lor, 28, Juni 2022).

## 5. Perencanaan Sarana Prasarana

“Jadi gini, kalau SD yang menjadi sasaran *regrouping* menerima, sarpras yang ada di SD itu nanti diserahkan kepada SD terdekat atau SD induk yang akan diregroup” (10 Juni 2022).

## 6. Perencanaan Sekolah Induk

“Biasanya untuk memudahkan kita meregroupnya, mengindukkannya ke sekolah yang terdekat. SD yang terdekat itu bisa kiri, bisa kanan, bisa utara, bisa selatan, yang terdekat terutama. Bila ada SD dekat-dekat itu prioritasnya apa? Prioritasnya ya menginduk ke SD yang diantara 4 itu siswanya paling sedikit” (Sumani, M.Pd. Kepala SDN 1 Karang Lo Lor, 6 Juni 2022).

## 7. Perencanaan Komite Sekolah

“Ini berbagai kemungkinan tergantung sekolah induk yang mejadi tempat baru bagi siswa itu, tergantung. Karena gini ada yang bubar kenyataannya langsung bubar, tapi ada karena SD induk ini merasa ditambah jumlah siswanya, kemudian kepala sekolah mengambil kebijakan memberdayakan komite sekolah SD sana. Jadi tidak secara otomatis bubar tidak, tergantung situasi kondisi di sekolah masing-masing sekolah yang digabungi. Karena di sini banyak yang komitenya, komite sana yang sudah bubar ditarik menjadi penguat di SD yang digabungi. Karena kami juga memberikan contoh, siswa, gurunya juga ada yang mengikuti. Ada sekolah, pak kalau saya ngambil komite sana bagaimana, ok silakan gak papa karena sana juga wilayah SD panjenengan. Tapi gak pasti bubar ya ada yang diperdayakan, tergantung pola pikir kepala sekolahnya” (Sumani, M.Pd. Kepala SDN 1 Karang Lo Lor, 6 Juni 2022).

## DOKUMENTASI GAMBAR



Tugu Nama Sekolah



Tulisan di belakang Tugu Nama Sekolah



Suasana Sekolah saat KBM Berlangsung



Purnawiyata



Pondok Ramadhan





Pondok Ramadhan



Pondok Ramadhan



Pondok Ramadhan



Pondok Ramadhan



Pondok Ramadhan



Pagelaran Seni



Gajah-gajahan



Kegiatan Olah Raga